

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 11 - 17	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.23707
---------------------------	------------	----------	------------------	---

ADAPTASI BENCANA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN: STUDI TENTANG RESILIENSI WILAYAH PESISIR

Syarfina Mahya Nadila¹, Annisa Meutia Ratri²

^{1,2} Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
mahya.nadila@gmail.com, annisa.meutia.ratri@lipi.go.id

ABSTRAK

Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana, baik alam maupun ekologis. Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya menghadapi kerentanan dari sisi ekologis tetapi juga sosial ekonomi. Kompleksitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat menunjukkan pentingnya strategi komprehensif dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Tulisan ini bermaksud untuk mengelaborasi strategi adaptasi bencana dalam rangka mewujudkan wilayah yang tangguh dari bencana di wilayah Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbasis data primer yang bersumber dari wawancara mendalam dan observasi yang juga dilengkapi dengan data dan literatur sekunder. Penelitian ini mendapati upaya adaptasi bencana berbasiskan pada masyarakat. Peta kerentanan, *living food bank*, kelompok siaga bencana, serta *early warning system* merupakan salah satu cara adaptasi masyarakat dalam kolaborasi kolektif dengan pemerintah atau organisasi masyarakat sipil. Penelitian ini menunjukkan bahwa adaptasi sosial merupakan aspek penting untuk mendukung keberlangsungan *livelihood* masyarakat dan adaptasi bencana yang inklusif.

Kata Kunci: Adaptasi; Bencana; Padang Pariaman

ABSTRACT

Padang Pariaman Regency is highly vulnerable to disasters. People in the regency face significant socio-economic and ecological challenges. It is important to have comprehensive strategies that consist of the complexity in social, culture, and economics of society. This research aims to elaborate social participation as a disaster adaptation strategy to foster resilience in the Padang Pariaman area. This research uses qualitative methods. Data were collected both from primary source (in-depth interview and observation) and secondary data source (desk and literature study). This research found that vulnerability maps, living food bank, disaster preparedness groups, and early warning systems are the spaces for community adaptation as a strategy for collective disaster adaptation between stakeholders in government, people and civil society. Further, This research shows that social adaptation is an important aspect to support community livelihood sustainability and inclusive disaster adaptation.

Keywords: Adaptation; Disaster; Padang Pariaman

PENDAHULUAN

Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat merupakan wilayah yang masuk pada zona gempa tertinggi di daerah peisisir Sumatera Barat (BAPPEDA Kab. Padang Pariaman 2013). Berbagai peristiwa bencana terjadi di wilayah ini baik bencana alam atau bencana non-alam, seperti banjir besar dan bandang, gempa, angin puting beliung, tanah longsor, abrasi, dan kebakaran pasar. Pada tahun 2009, bencana gempa telah memberikan dampak kerusakan yang besar pada aspek fisik maupun non fisik di Wilayah Padang Pariaman dengan sekitar 400 jiwa menjadi korban pada bencana tersebut (Kasim 2010). Secara kronologis, adapun berbagai peristiwa bencana besar di Kabupaten Padang Pariaman dapat terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1

Sejarah Bencana Besar di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 1914 - 2009

No.	Tahun	Kejadian Bencana	Keterangan
1.	1914	Banjir Besar	7 Kecamatan
2.	1926	Gempa	7,2 SR, Pusat di Padang Panjang
3.	1934	Banjir Bandang	Nagari Malai V Suku
4	1967	Angin Puting Beliung	Kabupaten Padang Pariaman
5.	1983	Tanah Longsor	Kabupaten Padang Pariaman
6.	1996	Kebakaran Pasar	Pasar sungai Limau
7.	2000	Abrasi Pantai	60 km bibir pantai rusak
8.	2005	Gempa Bumi, 10 april	5,8 SR, 500 bangunan rusak
9.	2007	Tanah Longsor, 8 Januari	13 orang korban, KOLam Jariah
10.	2007	Banjir, 22-23 Januari	1.506 rumah terendam, 108 HA lahan pertanian rusak di 9 Kecamatan
11.	2007	Angin Puting Beliung	43 bangunan rusak di 6 Kecamatan
12.	2007	Gempa Bumi, 6 Maret	6,3 SR, ± 12.000 bangunan rusak
13.	2007	Gempa Bumi, 12-13 September	7,3/7,7 SR, ± 7.000 bangunan rusak
14.	2009	Gempa bumi, 30 September	7,9 SR + 87.929 bangunan rusak

Sumber: (Mukhni 2012)

Hasil kajian risiko dengan ancaman bencana tsunami memperlihatkan bahwa umumnya di pesisir barat Sumatra memiliki tingkat risiko tinggi dan sangat tinggi terutama di daerah yang berpenghuni (BAPPEDA Kab. Padang Pariaman 2013). Wilayah di Kabupaten Padang

Pariaman berada pada wilayah yang rentan terhadap risiko bencana alam baik gempa bumi dan tsunami. Sayangnya, secara masif pemukiman penduduk berdiri di Kawasan yang rentan bencana tersebut. Kawasan pemukiman tersebut merupakan perumahan yang dibangun swadaya masyarakat atau perumahan yang tumbuh secara alamiah. Oleh karena itu, banyak rumah-rumah penduduk yang tidak mengikuti aturan tata ruang yang ada. Hal ini menyebabkan tidak hanya kerentanan terhadap bencana melainkan kondisi degradasi lingkungan dan kemiskinan penduduk yang menjadi tantangan dalam penanganan kebencanaan di wilayah tersebut. Untuk itu, Di Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat tidak hanya menghadapi kerentanan dari sisi ekologis tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi.

Pada umumnya tidak semua upaya penanganan dan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah membuka ruang adaptasi bencana yang luas untuk masyarakat. Adanya kecenderungan bersifat *top-down* dibandingkan *bottom-up* seperti pada pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah atau strategi terkait adaptasi bencana. Padahal, suara dari masyarakat dapat menghasilkan eksternalitas positif dalam mengurangi kerentanan dan resiko bencana (Witvarapong, N., Muttarak, R., & Pothisir 2015). Hal ini menjadi menarik, untuk mengetahui strategi adaptasi bencana dalam mewujudkan wilayah Padang Pariaman yang tangguh bencana. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengelaborasi kondisi rentan bencana dan strategi adaptasi bencana dalam rangka membangun resiliensi wilayah di pesisir Kabupaten Padang Pariaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terhadap strategi adaptasi bencana dengan lokasi penelitian di Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Untuk mengakses kondisi demografis dan ekologis, penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan sejak 2018 serta dilengkapi oleh data dan literatur sekunder terkait profil dan data kebencanaan di Kabupaten Padang Pariaman.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada beberapa informan dari elemen

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 11 - 17	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.23707
---------------------------	------------	----------	------------------	---

masyarakat, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Observasi pada lokasi penelitian juga merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data dan pengorganisasian data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (Flick 2014). Data yang digunakan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam adaptasi bencana.

Secara umum, adaptasi masyarakat pesisir terhadap bencana terdapat berbagai jenis. Strategi adaptasi masyarakat pesisir dalam bencana dapat dibagi melalui 3 (tiga) jenis adaptasi yakni adaptasi fisik, adaptasi ekonomi, dan adaptasi sosial (Asrofi, Akhmad 2017). Adaptasi fisik memfokuskan pada perbaikan bangunan secara fisik seperti modifikasi dan renovasi rumah, pengamanan perabotan rumah tangga, perbaikan jalan lingkungan, perbaikan saluran drainase lingkungan. Adaptasi ekonomi merupakan adaptasi yang dilakukan akibat rusak dan terganggunya sumber mata pencaharian akibat bencana sehingga perlu adanya diversifikasi mata pencaharian baru. Sedangkan, adaptasi sosial dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar, kesehatan, hajatan dan pemakaman sebagai contoh.

Merujuk pada pemahaman atas ruang partisipasi. Gaventa (Gaventa dalam Warsilah 2017) mengungkapkan bahwa ruang partisipasi terdiri dari berbagai bentuk yakni ruang tertutup, diundang dan ruang yang direbut dan dibuat. Ruang tertutup (*Closed*) menekankan pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada ruang tertutup tanpa adanya proses yang lebih inklusif. Ruang "diundang" (*invited*) merupakan ruang dimana masyarakat diundang dalam suatu bentuk konsultasi. Ruang diklaim atau menciptakan ruang yang dilakukan oleh gerakan sosial atau forum warga (Warsilah 2017). Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan kondisi rentan bencana dan strategi adaptasi bencana yang mendukung resiliensi wilayah Padang Pariaman. Resiliensi bencana di wilayah pesisir mengindikasikan kapasitas suatu sistem, komunitas atau masyarakat, negara atau institusi untuk menghadapi dan pulih dari bencana (OECD 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman merupakan 1 (satu) dari 9 (sembilan) kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan memiliki 103 nagari. Dari ke 17 wilayah kecamatan tersebut berdasarkan data tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 408.612 jiwa yang terdiri dari 201.130 laki-laki dan 207.482 perempuan (BPS Kabupaten Padang Pariaman 2017). Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2016 tingkat kepadatan penduduk sebanyak 308 jiwa/km². Sedangkan untuk jumlah penduduk yang terbanyak berada di Kecamatan Batang Anai yaitu mencapai 46.682 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terendah berada di Kecamatan Padang Sago yaitu berjumlah 8.304 jiwa. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 6 kecamatan berada di pesisir yaitu Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Gasan dan V Koto Kampung Dalam.

Penduduknya yang bermukim di wilayah pesisir salah satunya adalah Nagari Kataping sebagian besar bermata pencaharian nelayan dan juga petani, karena di wilayah ini sebagian wilayahnya berupa pesisir, persawahan dan kebun terutama buah semangka dan kelapa. Sayangnya, penduduk di wilayah ini memiliki taraf atau tingkat kehidupannya pada umumnya masih tergolong masyarakat miskin. Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan serta pariwisata. Berbagai strategi ekonomi baik dengan diversifikasi mata pencaharian maupun penguatan kelembagaan telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Kerentanan terhadap Bencana

Secara geologis Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia. Bentuk bencana yang pernah dan mungkin terjadi di Kabupaten Padang Pariaman identik dengan kondisi alam tersebut yaitu bencana banjir, tanah longsor, angin badai/puting beliung, abrasi pantai, gempa bumi tsunami dll. Selain faktor alam, Kabupaten Padang Pariaman juga termasuk rawan bencana yang timbul akibat ulah

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 11 - 17	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.23707
---------------------------	------------	----------	------------------	---

manusia seperti kebakaran, banjir dan tanah longsor. Penyebab bencana banjir di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari beberapa faktor seperti faktor curah hujan dan fluktuasi gelombang laut, faktor pembukaan lahan pada hulu sungai yang menyebabkan erosi sehingga terjadi sedimentasi dari erosi permukaan sungai. Kurangnya kapasitas tampung sungai yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya banjir. Faktor adanya pembuangan dan penumpukan sampah pada sungai dan saluran drainase kota juga dapat menyebabkan terjadinya banjir, karena hal ini akan memperlambat dan menyumbat aliran air (Dewi 2016)

Pada tahun 2015, telah terjadi Sembilan kejadian tanah longsor di lima Kecamatan meliputi kecamatan Sungai Limau (3 kejadian), Lubuk Alung (1 Kejadian), V Koto Kampung dalam (1 Kejadian), V Koto Timur (3 kejadian), Sintuk Toboh Gadang (1 Kejadian). Tidak ada korban jiwa pada saat bencana tanah longsor terjadi dan selama tahun 2015 tidak terjadi bencana gempa besar yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda (Dewi 2016). Adapun faktor penyebab terjadinya tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman adalah (1) keadaan topografi yang berupa bukit-bukit yang pada umumnya berlereng curam, (2) struktur tanah pada bukit umumnya sangat labil dan di beberapa tempat di dominasi oleh bebatuan, (3) curah hujan, (4) keadaan vegetasi. Bencana angin puting beliung terjadi 25 kali sepanjang tahun 2015 dengan 1 korban jiwa. Angin puting beliung terjadi akibat cuaca ekstrim di Kabupaten Padang Pariaman (Dewi 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pesisir Kabupaten Padang Pariaman merupakan rawan bencana. Pesisir Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis dan Nan Sabaris masuk kedalam zona kerawanan tinggi.

Selain banjir dan tanah longsor, lokasi Kabupaten Padang Pariaman yang berada di pesisir memiliki potensi bahaya bencana yang cukup tinggi seperti abrasi, gelombang ekstrim, gempa bumi dan tsunami dan bencana yang paling dikhawatirkan adalah gempa yang berpotensi tsunami. Hal ini dikarenakan tingkat kerusakan yang tinggi akibat tsunami.

Kondisi pesisir Kabupaten Padang Pariaman yang rentan terhadap ancaman bencana membutuhkan perencanaan yang komprehensif. Misalnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030 Pasal 77 Ketentuan Umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa. Karena adanya Tsunami yang mengancam seluruh wilayah pesisir baik di area terbangun dan tidak terbangun, khususnya ancaman kepada perumahan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman yang tumbuh secara menyebar (BAPPEDA Kab. Padang Pariaman 2013). RP3KP mengatur tidak hanya daerah pemukiman masyarakat tetapi juga arahan membangun Kawasan bencana sesuai tipologi Kawasan. Melihat potensi bencana yang besar dan juga kondisi di masyarakat yang bermukim di pesisir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman membuat Rencana Penanggulangan Daerah 2010-2018. Visi rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018 adalah "Padang Pariaman Siaga dan Tangguh Menghadapi Bencana". Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiap-siagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu
2. Membangun ketahanan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kebencanaan.
3. Melindungi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dari ancaman bencana (BAPPEDA Kab. Padang Pariaman 2013)

Dalam RPB juga dijelaskan mengenai tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas dan tingkat risiko (Tabel 2). Tingkat bahaya adalah potensi timbulnya korban jiwa pada zona ancaman tertentu pada suatu daerah akibat terjadinya bencana. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Tingkat risiko adalah perbandingan antara tingkat kerugian dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerugian dan tingkat bahaya akibat bencana (BAPPEDA Kab. Padang Pariaman 2013).

Tabel 2
Tingkat Bahaya, Kerentanan, Kapasitas dan Risiko di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
3.	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
4.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5.	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
6.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
8.	Tsunami			Rendah	
9.	Gagal Teknologi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
10.	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang

Sumber: Laporan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman 2014-2018 (BAPPEDA Kab. Padang Pariaman 2013).

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Padang Pariaman untuk selalu waspada terhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi dengan meningkatkan kapasitas masyarakatnya khususnya di wilayah pesisir. Hal ini dikarenakan dari sepuluh jenis bencana Kabupaten Padang Pariaman dalam tingkat bahaya yang sedang dan tinggi. Pada tingkat kerentanan hampir seluruhnya tinggi dengan tingkat risiko yang juga tinggi sedangkan untuk tingkat kapasitas masyarakat rendah untuk keseluruhan bencana.

Strategi Adaptasi dalam mendukung Resiliensi di Wilayah Padang Pariaman

Secara umum, Pemerintah Padang Pariaman telah melakukan berbagai strategi dalam upaya adaptasi bencana guna mewujudkan resiliensi wilayah dari bencana, tidak hanya dalam perencanaan tata ruang. Tetapi juga program kesiapsiagaan bencana dan program peningkatan ekonomi masyarakat dalam adaptasi bencana di wilayah tersebut yang juga menjadi ruang untuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi strategis karena masyarakat hidup di wilayah pesisir dan memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan bencana gempa yang berpotensi tsunami ataupun abrasi.

Salah satu upaya membuka ruang partisipasi dilakukan di Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai. Potensi bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami, BPBD Propinsi Sumatera Barat membuat program edukasi ke masyarakat tentang bencana seperti sosialisasi

rawan bencana, desa tangguh bencana dan kelompok siapa bencana. Program ini dilakukan di hampir semua kecamatan. Kegiatan desa tangguh bencana atau Nagari tangguh bencana dilakukan di dua lokasi per tahun. Untuk pemilihan desa tangguh bencana diusulkan dari BPBD Kabupaten. Untuk pelaksanaan dilakukan oleh BPBD Kabupaten sedangkan anggaran dari BPBD Provinsi.

Permasalahan Pemukiman merupakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap penduduk yang tinggal di pesisir. Sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir adalah nelayan. Pemukiman tempat tinggal mereka berada di zona merah atau zona bahaya tsunami. Mereka tetap ingin bermukim di zona tersebut untuk menjaga keberlangsungan mata pencaharian mereka. Bila dipindahkan mereka khawatir akan tempat menambatkan perahu dan jarak yang jauh ke bibir pantai. Selain itu, status tanah yang masih *tanah pusako* membuat mereka tidak mau berpindah tempat. Untuk permasalahan ini yang bisa pemerintah lakukan adalah memberikan himbauan terkait bahaya-bahaya gempa dan tsunami, melakukan sosialisasi-sosialisasi secara berkala tentang kesiap-siagaan bencana, dan melakukan simulasi jika bencana terjadi.

Selain itu, cara lain yang bisa dilakukan adalah membangun rumah yang tahan gempa tetapi cara ini tidak bisa dilakukan karena terbentur anggaran. Anggaran yang tidak mencukupi membuat bantuan rumah tersebut hanya sebatas membuat rumah-rumah yang awalnya rusak akibat gempa menjadi layak huni lagi. Kategorisasi bantuan dari rumah dengan tingkat kerusakan ringan, sedang dan tinggi. Untuk rumah dengan tingkat kerusakan yang ringan mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah, untuk yang sedang 10 juta rupiah dan untuk yang rusak parah 15 juta rupiah. Awalnya program ini hanya bersifat stimulus dari pemerintah. Pemerintah berharap penduduk dapat menambahkan biaya untuk membuat rumah tahan gempa. Namun, hal ini tidak berhasil karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang hanya bermata pencaharian sebagai nelayan yang hidup dalam keterbatasan.

Bencana yang juga sering terjadi di pesisir selain gempa yang berpotensi tsunami adalah bencana abrasi. Abrasi terjadi di Nagari Ulakan, lokasi Nagari ini bersebelahan dengan Nagari Batang Anai. Abrasi terjadi mulai tahun 2016 dan semakin parah satu tahun belakangan ini. Panjang abrasi sepanjang 1 kilo meter yang awalnya hanya

100 meter. Abrasi ini menyulitkan penduduk yang sebagian besar bermata-pencaharian sebagai nelayan dan penjual kedai-kedai dipinggir pantai. Abrasi mengakibatkan jumlah ikan tangkapan menjadi menurun. Pantai ini awalnya adalah kawasan wisata banyak kedai-kedai yang menjual makanan di pesisir pantai. Abrasi membuat bibir pantai terkikis kini, mendekati kedai-kedai penjual makanan.

Program terkait kebencanaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kelompok siaga bencana di Nagari Kataping. Kelompok siaga bencana ini merupakan ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah untuk mengundang partisipasi dari masyarakat dalam adaptasi bencana yang dilakukan. Ruang partisipasi ini merupakan ruang partisipasi yang diundang atau menurut Gaventa disebut *invited*. Gaventa mengungkapkan bahwa ruang partisipasi terdiri dari berbagai bentuk yakni ruang tertutup, diundang dan ruang yang direbut dan dibuat. Ruang tertutup (*Closed*) menekankan pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada ruang tertutup tanpa adanya proses yang lebih inklusif. Ruang "diundang" (*invited*) merupakan ruang dimana masyarakat diundang dalam suatu bentuk konsultasi. Ruang diklaim atau menciptakan ruang yang dilakukan oleh gerakan sosial atau forum warga (Warsilah 2017). Kelompok ini berjumlah 30 orang termasuk pengurus. Kelompok siaga bencana ini berawal dari gempa tahun 2009. Tugasnya adalah saling berkomunikasi dengan pemerintah pusat lewat radio untuk menginfokan kondisi cuaca di lokasi. Adapun latar belakang berdirinya kelompok siaga bencana ini adalah kesulitannya pendataan warga untuk bantuan saat gempa terjadi. Ini adalah pengalaman yang dirasakan oleh warga saat gempa 2009. Kondisinya saat itu adalah ketidaktahuan jalur-jalur evakuasi, titik kumpul dan kesulitan mendapatkan bantuan saat gempa terjadi.

Dalam kelompok siaga bencana ini, partisipasi dilakukan tidak hanya dalam bentuk kontribusi tenaga dan material tetapi juga input terhadap proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Secara umum, berbagai bentuk partisipasi masyarakat dapat secara detail dilihat apakah partisipasi masyarakat sebagai input dari para perencana, atau sebagai input untuk mobilisasi sumber daya lokal, atau sebagai pengelolaan berbasis masyarakat atau untuk mobilisasi komunitas. Partisipasi dilakukan dengan memobilisasi sumber daya lokal dan komunitas untuk bersama-sama membuat peta kapasitas

nagari kataping sekaligus simulasi bila terjadi bencana.

Gambar 1
Tanda Jalur Evakuasi Peta Kerentanan dan Kapasitas Nagari Kataping



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Adanya partisipasi masyarakat untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk adaptasi fisik seperti peta, kesepakatan *early warning system* bersama berbagai *stakeholder* terkait khususnya pemerintah menjadi penting dalam proses keberlanjutan adaptasi yang dilakukan. Hal ini dikarenakan partisipasi perlu didukung dengan adanya kapasitas agar partisipasi tersebut berjalan efektif. Partisipasi masyarakat merupakan suatu yang fundamental untuk berperan sejak awal perencanaan dari adaptasi yang dilakukan termasuk pada saat rehabilitasi dan saat terjadi bencana (Osti 2004). Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk tenaga, material maupun ide lokal atau masyarakat berpartisipasi melakukan seluruh analisis, keputusan dan pemilihan opsi-opsi dalam adaptasi yang dilakukan.

Partisipasi ini juga dibekali dengan pembelajaran masyarakat dari gempa yang terjadi sebelumnya. Adanya pula kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan Lembaga swadaya masyarakat dalam adaptasi bencana yang dilakukan. Pemerintah sebagai *stakeholder* yang memiliki otoritas vertikal untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses adaptasi bencana. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai bagian dari *civil society* pun turut serta melakukan pendampingan untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam adaptasi kebencanaan tersebut.

Untuk itu, adaptasi dapat dilakukan dengan beragam aksi yang membuka ruang partisipasi masyarakat di wilayah Nagari Kataping ini, khususnya dalam membangun aktivitas yang

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 10	NOMOR: 1	HALAMAN: 11 - 17	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.23707
---------------------------	------------	----------	------------------	---

dapat menjaga ketahanan pangan mereka, seperti dengan *living foodbank* yakni menanam tanaman seperti palawija, kelapa jengkol, rambutan, pisang, ubi kayu, ubi jalan dll. Upaya ini dimaksudkan bila suatu saat terjadi gempa mereka memiliki pasokan untuk logistik. Berbagai upaya yang dilakukan sebagai adaptasi bencana di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa strategi adaptasi masyarakat pesisir tidak hanya selalu tentang adaptasi fisik, adaptasi ekonomi, dan adaptasi sosial yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar, kesehatan (Asrofi, Akhmad 2017) melainkan juga pada adaptasi untuk ketahanan pangan yang dilakukan bersama-sama didalam masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam adaptasi bencana sangatlah penting untuk mengetahui apa yang telah dimiliki masyarakat seperti pengalaman, ide atau pengetahuan terkait kebencanaan itu sendiri. Sehingga masyarakat akan dapat sinergis dengan ruang-ruang partisipasi yang diberikan kepada mereka baik dalam program-program pemerintah maupun dari *stakeholder* lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus terhadap isu kebencanaan. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam upaya adaptasi seperti peta kerentanan, *living food bank*, *early warning system* hingga keberlangsungan kelompok siaga bencana. Strategi tersebut merupakan adaptasi bencana yang dapat dipelajari dari Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di wilayah Nagari Kataping. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adaptasi yang bisa dilakukan tidak hanya pada aspek infrastruktur dan ekonomi tetapi sosial sebagai aspek penting dalam adaptasi bencana yang inklusif. Untuk itu, adaptasi bencana penting melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek yang dilakukan baik perencanaan dan intervensi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada DIPA Perkotaan Tahun 2018 dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan yang telah memberikan ruang elaborasi untuk mengembangkan temuan penelitian DIPA tentang pembangunan eksklusif di wilayah Sumatera menjadi tulisan tentang adaptasi bencana. Semoga tulisan ini dapat menambah nilai kebermanfaat

dari dilakukannya penelitian ini secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi, Akhmad, Dkk. 2017. "Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Dalam Penanganan Bencana Banjir Rob Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah." *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol.23, No: 125–44.
- BAPPEDA Kab. Padang Pariaman. 2013. "Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman 2014-2018."
- BPS Kabupaten Padang Pariaman. 2017. *Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka*. Pariaman: BPS Kabupaten Padang Pariaman.
- Dewi, Yulia Kristina dkk. 2016. *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015*. Padang Pariaman: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman.
- Flick, Uwe. 2014. *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. London: Sage.
- Kasim, Muslim. 2010. *Getar Episentrum Di Ranah Minang*. Bogor: Indomedia.
- Mukhni, Ali. 2012. *Tiga Tahun Padang Pariaman Pascagempa 30 September 2009*. Padang Pariaman: BPBD Kabupaten Padang Pariaman.
- OECD. 2013. "What Does 'Resilience' Mean for Donors." *OECD Fact Sheet*.
http://www.oecd.org/dac/governance-development/May_10_2013_FINAL_resilience_PDF.pdf.
- Osti, Rabindra. 2004. "Poor, Forms of Community Participation and Agencies' Role for the Implementation of Water-Induced Disaster Management: Protecting and Enhancing The." *Disaster Prevention and Management* Vo.13.No.1: 6–12.
- Warsilah, Henny (ed). 2017. *Pembangunan Inklusif Dan Kebijakan Sosial Di Kota Solo Jawa Tengah*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Witvarapong, N., Muttarak, R., & Pothisir, W. 2015. "Social Participation and Disaster Risk Reduction Behaviors in Tsunami Prone Areas." *PloS One*, 10 (7), E0130862. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130862>.